

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2025**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2026**



## Daftar isi

Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif .....	3
Bab I      Pendahuluan .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
Bab II     Perencanaan Kinerja .....	9
Bab III    Akuntabilitas Kinerja .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
1. Capaian kinerja tahun 2025.....	14
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun 2024.....	15
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra tahun 2030.....	16
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan tingkat nasional/provinsi di tahun 2025.....	17
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan.....	17
6. Informasi atau analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.....	20
7. Informasi atau analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	22
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah .....	23
D. Prestasi Penghargaan yang Diraih .....	24
Bab IV    Penutup .....	25

### LAMPIRAN

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.

**Bogor, Februari 2026**

**Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,  
dan Perkebunan Kabupaten Bogor**



**ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196710041992121001**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdapat 6 program dan 15 kegiatan dan 71 sub kegiatan untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan sasaran strategis yaitu meningkatnya produksi pertanian dan meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dalam Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tercapai. Adapun indikator sasaran strategis yaitu jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta produktivitas pertanian per hektar.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 kepada Bupati Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian agar menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis serta program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Bogor dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025.

Indikator kinerja sasaran strategis merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025. Indikator kinerja sasaran strategis ditentukan berdasarkan sasaran program sedangkan indikator kinerja program dipilih berdasarkan sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan dipilih dari sasaran sub kegiatan. Adapun indikator kinerja sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025, disajikan dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Diagram Alur Pikir Pengukuran Kinerja**

Metode penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang menyinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 merupakan dokumen evaluasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan.

## B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders; dan
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

## C. Tugas dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan usaha pertanian, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan usaha pertanian, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan usaha pertanian, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 2 (dua) sub bagian, dan 13 (tiga belas) tim kerja. Selain itu terdapat juga 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 13 (tiga belas) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berkedudukan di kecamatan. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

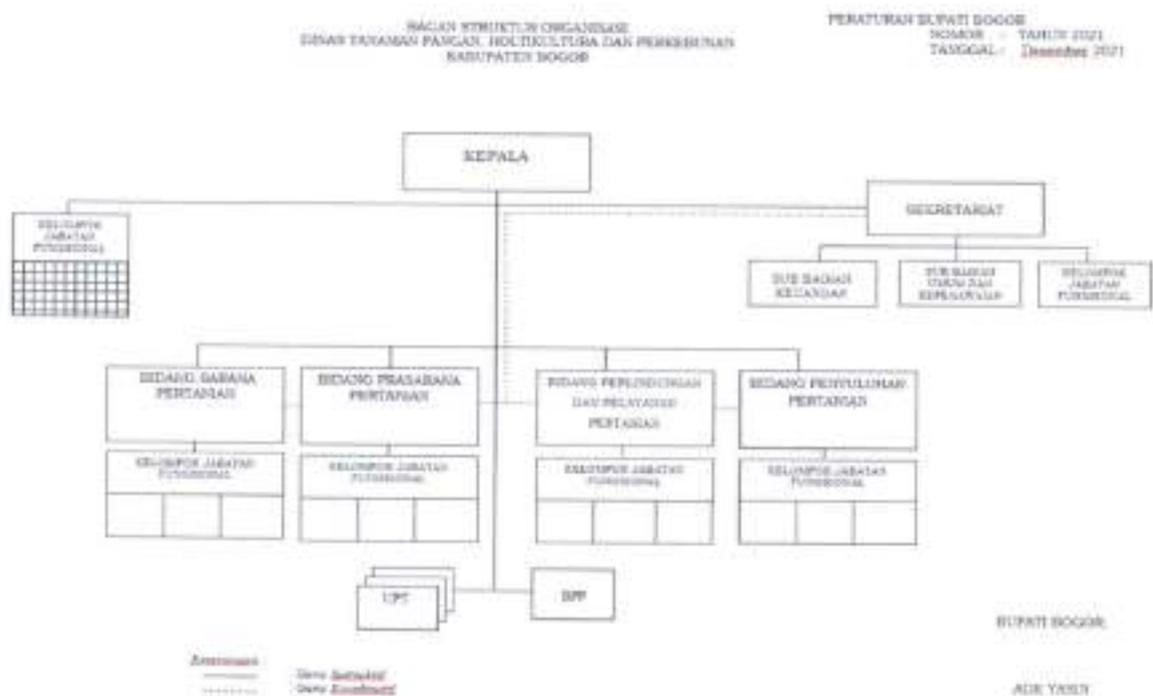
- 
- a. **Kepala Dinas** : **Entis Sutisna, S.Pd, MM**
  - b. **Sekretaris** : **Edy Mulyadi, ST, MT**
    - 1. Ketua Tim Program dan Pelaporan : Judo Satria, SE, M.Si
    - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Fritamia Saraswati, SP
    - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan : Indri Wulandari, SP
  - c. **Kepala Bidang Sarana Pertanian** : **Ruhendra, SP, MM**
    - 1. Ketua Tim Pupuk dan Pestisida : Dede Sopyandi, SP, MIR
    - 2. Ketua Tim Alat dan Mesin : Ervinia, SP, MM
    - 3. Ketua Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman : Asti Yayuk Wahyuni, S. Hut, M.Si
  - d. **Kepala Bidang Prasarana Pertanian** : **Indriyati, S.Hut**
    - 1. Ketua Tim Pengelolaan Lahan : Agus Kurniawan, S.Hut, MP
    - 2. Ketua Tim Pengelolaan Air : Lenora Azizah Nur, SP
    - 3. Ketua Tim Infrastruktur Pertanian : Acep Atmaja
  - e. **Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian** : **Judi Rachmat Sulaeli, S.Hut, MM**
    - 1. Ketua Tim Perlindungan Pertanian : Reza Septian, SP
    - 2. Ketua Tim Pelayanan Usaha Pertanian : Hotib, SP
    - 3. Ketua Tim Data dan Informasi : Ahmad Suwandi, SP
  - f. **Kepala Bidang Penyuluhan (PLT)** : **Judi Rachmat Sulaeli, S.Hut, MM**
    - 1. Ketua Tim Ketenagaan : Ateng Muhamad Naseh, S.Hut, MM
    - 2. Ketua Tim Kelembagaan : Febryantika, S.TP
    - 3. Ketua Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan : Restari Koestranti, S.PI

g. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

1. UPT Perbenihan (5 Wilayah Kerja)
2. UPT Proteksi Tanaman (2 Wilayah Kerja)
3. UPT Agribisnis (2 Wilayah Kerja)
4. UPT Mekanisasi Pertanian (3 Wilayah Kerja)

h. **Kelompok Jabatan Fungsional di 13 (tiga belas) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)**

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh Gambar 2.



Keterangan :

—————: Garis Instruktif

- - - - -: Garis Koordinatif

**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran PD	Indikator	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Tujuan PD :</b>						
Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Ton)	710.189	713.490	716.798	720.112	723.433
<b>Sasaran PD :</b>						
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar (Ton/Ha)	7,13	7,16	7,19	7,21	7,24

#### B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan	Ton	710.189
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	7,13
3	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	2,80
4	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,08
5	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	%	13,49
6	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	17,24
7	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	16,55
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	BB



### **Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RKPD tahun 2025. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yaitu tujuan daerah **"Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah"** dan sasaran daerah **"Meningkatnya Ketahanan Pangan"**. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam renstra melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**, dengan kegiatan :
  - A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
    - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
    - c. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.
  - B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
    - a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
    - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
    - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**, dengan kegiatan :
  - A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
    - b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kab/Kota;
    - c. Penyusunan Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.
  - B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
    - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
    - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
    - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
    - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

- 
3. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**, dengan kegiatan :
- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
    - b. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
    - c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
4. **Program Perizinan Usaha Pertanian**, dengan kegiatan :
- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
    - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
    - c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.
5. **Program Penyuluh Pertanian**, dengan kegiatan :
- A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
    - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
    - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
    - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
    - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
    - e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;
    - f. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;
    - g. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.
6. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan :
- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;



- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
  - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
  - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya;





- b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Pengadaan Mebel.
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan dengan realisasinya.

#### A. Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sesuai dengan hasil pengukuran kinerja secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.



## 1. Capaian Kinerja Tahun 2025



Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dihitung berdasarkan Sasaran Pertanian (SP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, namun Distanhorbun menyesuaikan target indikator kinerja yang disusun tahun 2025-2029, karena perhitungan BPS dengan metode KSA (Kerangka Sample Area) yang diukur menggunakan satelite hasilnya jauh berkurang dibandingkan dengan metode SP (Statistik Pertanian). Oleh karena itu, Distanhorbun melakukan penyesuaian. Tujuannya agar dapat dihitung secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu tiap tahunnya. Tingkat produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang melebihi target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produksi tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor cukup memberikan daya dukung bagi peningkatan ketahanan pangan. Adapun capaian jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada tahun 2025 tergolong sangat baik dengan capaian kinerja 110,95% dari target sebesar 710.189 ton dan terealisasi sebesar 787.942 ton.

Sedangkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha di bidang pertanian dengan satuan ton/ha. Tingkat produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang hampir mencapai target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor cukup memberikan daya dukung bagi peningkatan produksi pertanian. Adapun capaian produktivitas pertanian per hektar pada tahun 2025 tergolong sangat baik dengan capaian kinerja 111,50% dari target sebesar 7,13 ton/ha dan terealisasi sebesar 7,95 ton/ha.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun 2024



Dari segi realisasi, produksi pertanian di Kabupaten Bogor mengalami penurunan 14.499 ton dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2025 sebesar 787.942 ton sedangkan tahun 2024 sebesar 802.441 ton. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, **jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meningkat** sebesar 3,69% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,26% dan pada tahun 2025 sebesar 110,95%. Adapun faktor penyebab penurunan realisasi tahun 2025 terhadap tahun 2024 yaitu adanya degradasi lahan.

Adapun realisasi produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan 1,49 ton/ha dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 6,46 ton/ha sedangkan tahun 2025 sebesar 7,95 ton/ha. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, **produktivitas pertanian per hektar meningkat** sebesar 15,66% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 95,85% dan pada tahun 2025 sebesar 111,50%. Adapun faktor penyebab peningkatan realisasi tahun 2025 terhadap tahun 2024 antara lain penggunaan benih unggul, teknik budidaya yang tepat, dukungan teknologi pertanian, dan peningkatan kelembagaan petani.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja  
Tahun 2024 dan Tahun 2025



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja  
Tahun 2024 dan Tahun 2025



### 3.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Periode Renstra Tahun 2030

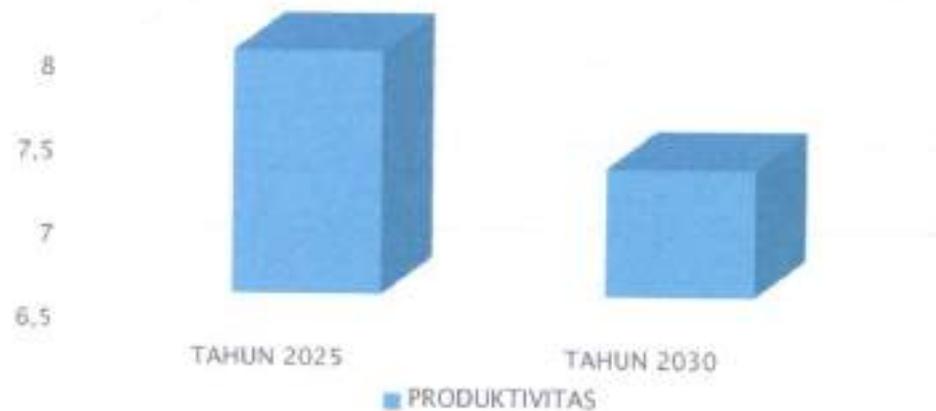


Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 108,42% dari target akhir renstra pada tahun 2030 sebesar 726.760 ton dan terealisasi 787.942 ton pada tahun 2025. Sedangkan capaian produktivitas pertanian per hektar Kabupaten Bogor tahun 2025 melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 109,50% dari target akhir renstra pada tahun 2030 sebesar 7,26 ton/ha dan terealisasi 7,95 ton/ha pada tahun 2025.

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Periode Renstra Tahun 2030



Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Periode Renstra Tahun 2030



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tingkat Nasional/Provinsi di Tahun 2025



Pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Kabupaten Bogor tidak dapat diperbandingkan karena berbeda metode perhitungan.

## 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan / Kegagalan

Faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian tingkat produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Berdasarkan gambar di atas, produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bogor pada tahun 2025 dipengaruhi oleh :

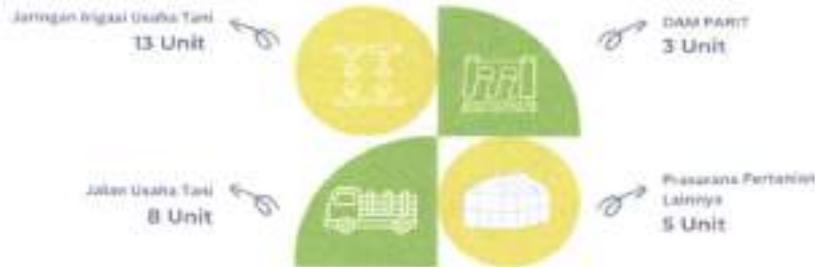
1. **PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN.** Ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi sebesar 19,47% dari target 17,24%. Kondisi ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian luas areal tanam seluas 89.389 ha. Selain itu, ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Bogor juga dipengaruhi oleh **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** yang ditandai dengan adanya capaian komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat sebanyak 3 cluster komoditas (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan). Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian antara lain adalah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih; Penjaminan

Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman; Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.



2. **PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.** Ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi sebesar 16,71% dari target 16,55%. Kondisi ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pengembangan Prasarana Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian sebanyak 3 dokumen. Selain itu, ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor juga dipengaruhi oleh **Pembangunan Prasarana Pertanian** yang ditandai dengan adanya capaian luas lahan yang terlayani prasarana pertanian seluas 380,04 ha. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian antara lain adalah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B; Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya; Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; serta Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

## PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN TA. 2025



3. **PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN.** Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian sebesar 4,43% dari target 2,80%. **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** di Kabupaten Bogor ditandai dengan adanya capaian jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian seluas 1.584,88 ha. Adapun upaya yang dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian antara lain adalah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

## PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN TA. 2025



4. **PERIZINAN USAHA PERTANIAN.** Pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian sebesar 17,53% dari target 13,49%. Pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** yang ditandai dengan adanya capaian jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian sebanyak 295 pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan untuk pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Bogor antara lain adalah Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian; Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

### PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN TA. 2025



Jumlah pelaku usaha  
perkabupaten

32 Poktan



Jumlah pelaku usaha  
yang dibina dan  
dibekali penerapan  
izin usahanya

295  
Pelaku Usaha



Jumlah kelompok tani yang  
mengajukan registrasi kebun

23 Poktan

5. **PENYULUHAN PERTANIAN.** Penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor dinilai optimal, hal ini diperlihatkan dari persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian sebesar 2,19% dari target 1,08%. Penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** yang ditandai dengan jumlah petani dan penyuluh yang meningkat kompetensinya sebanyak 2.652 orang. Adapun upaya yang dilakukan untuk penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor antara lain adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan; Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian; Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani; dan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

## PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TA. 2025



6. **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.** Hal ini diperlihatkan dari perolehan nilai AKIP perangkat daerah sebesar 75,75 poin dari target 74,45 poin dan nilai SKM sebesar 86,45 poin dari target 84,93 poin. Program penunjang ini dipengaruhi oleh **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Selain faktor-faktor pendukung capaian kinerja tersebut di atas, terdapat juga faktor penghambat antara lain adanya anomali iklim (dampak el-nino maupun la-nina) yang mengakibatkan kondisi tanaman mengalami kekeringan maupun kelebihan kadar air sehingga tanaman tidak produktif. Oleh karena itu diperlukan adanya akselerasi kinerja peningkatan produksi dan produktivitas pertanian pada tahun 2026, agar target tahun 2026 lebih besar atau sama dengan realisasi tahun 2025, sehingga Distanhordun memerlukan rekomendasi penyesuaian target kinerja di tahun 2026.



## 6. Informasi atau Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2025 didukung oleh 5 (lima) program utama antara lain :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi. Pada tahun 2025, realisasi kinerja program ini sebesar 19,47% dari target sebesar 17,24%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 112,94%.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan** Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi. Pada tahun 2025, realisasi kinerja program ini sebesar 16,71% dari target sebesar 16,55%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100,97%.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase penanganan dampak perubahan iklim

terhadap pertanian. Pada tahun 2025, realisasi kinerja program ini sebesar 4,43% dari target sebesar 2,80%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 158,21%.

- d). **Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian. Pada tahun 2025 realisasi kinerja program ini sebesar 17,53% dari target sebesar 13,49%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 129,95%.
- e). **Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Indikator kinerja program ini yaitu persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian. Pada tahun 2025, realisasi kinerja program ini sebesar 2,19% dari target sebesar 1,08%, hal ini ditandai dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 202,78%.

## 7. Informasi atau Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Efisiensi Anggaran (Rp)	Persentase Efisiensi Anggaran (%)
<b>A. UTAMA</b>		<b>952.498.322</b>	<b>2,82</b>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	564.052.256	1,55
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	69.378.068	0,99
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	71.737.493	4,46
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	74.734.671	4,76
5	Program Penyuluh Pertanian	172.595.834	2,31
<b>B. PENUNJANG</b>		<b>977.413.880</b>	<b>2,06</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	977.413.880	2,06
<b>Total</b>		<b>1.929.912.202</b>	<b>1,90</b>

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 efisiensi anggaran dari capaian sasaran strategis sebesar 1,90% atau setara Rp. **1.929.912.202,-**. Adapun efisiensi anggaran pada tahun 2025 tersebut diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. **101.557.142.152,-** dan terealisasi sebesar Rp. **99.627.229.950,-**. Alasan terjadinya efisiensi anggaran pada tahun 2025 yaitu adanya selisih penawaran dan efisiensi harga.

## **B. Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor**

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 terdiri dari 6 program dan 15 kegiatan dan 71 Sub Kegiatan. Adapun anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. **101.557.142.152,-** dan terealisasi sebesar Rp. **99.627.229.950,-** atau terserap 98,10% atau menurun sebesar 0,11% dari tahun 2024. Ringkasan mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, dan realisasi anggaran yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Keg.	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
						Keu (%)	Fisik (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	38	47.458.953.571	46.481.539.691	97,94	100,00
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	11	36.458.941.985	35.894.889.729	98,45	100,00
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2	7	7.004.722.148	6.935.344.080	99,01	100,00
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	4	1.607.260.291	1.535.522.798	95,54	100,00
5.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1	4	1.569.738.967	1.495.004.296	95,24	100,00
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	7	7.457.525.190	7.284.929.356	97,69	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>71</b>	<b>101.557.142.152</b>	<b>99.627.229.950</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>



### C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi antara lain :

- A). Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil.
- B). Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif.
- C). Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian.
- D). Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas.
- E). Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- A). Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sesuai penerapan SOP/GAP/GHP.
- B). Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara masif dan berkelanjutan.
- C). Menerapkan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat.
- D). Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menekan resiko bencana pertanian.
- E). Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan penyuluh pertanian dan petani millennial.

### D. Prestasi Penghargaan yang Diraih

Adapun prestasi penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2025 yaitu :

1. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP Wilayah V Kab. Bogor sebagai Juara I Kategori Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.





2. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Gapoktan Benteng Makmur Kab. Bogor sebagai Juara I Kategori Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
3. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Abror (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Apresiasi Regenerasi Petani Inovatif dan Berdaya Saing Tanaman Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Barat.
4. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Supardi (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Apresiasi Regenerasi Petani Inovatif dan Berdaya Saing Tanaman Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat.
5. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Mad Enoh (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
6. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor sebagai Juara Umum Penghargaan Insan Pertanian Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
7. Penghargaan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor sebagai Juara I Lomba Stand Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Barat.





## BAB IV

### PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran strategis Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah dicapai melalui 6 program, 15 kegiatan, dan 71 sub kegiatan. Faktor utama keberhasilan tercapainya kinerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan beserta jajaran staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Namun demikian, untuk tahun 2026, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 antara lain :

1. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beserta peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui penerapan standar operasional kegiatan dimana dinas merupakan regulator dan fasilitator dalam pembangunan pertanian.
2. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan.
3. Optimalisasi kualitas dan penggunaan data statistik dalam pengelolaan sektor pertanian.
4. Peningkatan teknologi budidaya dan kualitas produk pertanian khususnya komoditas unggulan yang memiliki peluang pasar tinggi.



# LAMPIRAN



1. SASARAN STRATEGIS ( Strategic Outcome )  
**Meningkatnya produktivitas pertanian**
2. Indikator SASARAN STRATEGIS ( Strategic Outcome ) :  
 • Jumlah produksi sayuran organik, hortikultura, dan perkebunan

1. Sasaran Strategis Menstra PD ( Intermediate Outcome )  
 Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
2. Indikator :  
 • Produktivitas pertanian per hektar

1. 1. Sasaran Program ( Intermediate Outcome )  
 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Indikator :  
 • Nilai AKIP

1. Sasaran Kegiatan ( Immediate Outcome )  
 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Indikator :  
 • Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
 Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Indikator :  
 • Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2. Indikator :  
 • Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

1. 2. Sasaran Program ( Intermediate Outcome )  
 Terperuhnya kebutuhan sarana pertanian

2. Indikator :  
 • Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi

1. Sasaran Kegiatan ( Immediate Outcome )  
 Tersedianya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat

2. Indikator :  
 • Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
 Tersedianya benih/bibit sayuran dan tanaman obat

2. Indikator :  
 • Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag  
 • Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag

1. 3. Sasaran Program ( Intermediate Outcome )  
 Terperuhnya kebutuhan prasarana pertanian

2. Indikator :  
 • Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi

1. Sasaran Kegiatan ( Immediate Outcome )  
 Tercapainya luas lahan yang terlayani prasarana pertaniannya

2. Indikator :  
 • Total Luas Lahan yang Terlayani Prasarana Pertanian

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
 Terbangun, terhibitas, dan terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani

2. Indikator :  
 • Jumlah jaringan irigasi usaha tani

1. 4. Sasaran Program ( Intermediate Outcome )  
 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

2. Indikator :  
 • Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian

1. 5. Sasaran Program ( Intermediate Outcome )  
 Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian

2. Indikator :  
 • Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan perimbangan teknis ijin usaha pertanian



Terdapatnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Indikator :

- Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

1. Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)  
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD

2. Indikator :

- Pertumbuhan realisasi anggaran perangka-  
sasaran

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terdapatnya pelaksanaan kegiatan  
Layanan AEN

2. Indikator :

- Jumlah Orang yang Menikmati  
Gaya dan Tunjangan AEN

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terdapatnya Dokumen Perencanaan dan  
Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD

2. Indikator :

- Jumlah Dokumen  
Perencanaan dan  
Penguji/Verifikasi Keuangan  
SKPD

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terdapatnya Dokumen Kemitraan dan  
Pemerataan Anggaran SKPD

2. Indikator :

- Jumlah Dokumen Kemitraan  
dan Pemerataan Anggaran  
SKPD

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terdapatnya Laporan Keuangan Arah  
Tinggi (LAKAT) dan Laporan RENCANA  
PENGANTARAAN KEMERDEKAAN  
TANPA BUNDA

2. Indikator :

- Jumlah Laporan Keuangan  
Arah Tinggi (LAKAT) dan Laporan  
Rencana Kemandirian Perencanaan  
Laporan Keuangan Arah Tinggi  
SKPD

- Jumlah Perbaikan  
Lahan
- Jumlah Sub  
Miwah (Lahan)  
yang Dikelola  
Pekelangan dan  
Perhutanan

1. Sasaran Sub Kegiatan (

Output )

Terdapatnya benih baik  
untuk pemertanian yang  
berkelanjutan

2. Indikator :

- Jumlah bibit  
berkualitas  
pembudidayaan yang  
diperoleh petani  
kegiatan
- Jumlah bibit  
berkualitas  
pembudidayaan yang  
diperoleh petani  
di lain
- Jumlah Kualitas  
Jumlah SDG  
Negeri Tanggung  
yang Otonomi  
Pemerintahan  
Kemampuan

1. Sasaran Sub Kegiatan (

Output )

Terdapatnya perantara pasar  
dan layanan jasa yang  
berkelanjutan

2. Indikator :

- Jumlah bibit  
tanaman buah yang  
dikembangkan  
dikembangkan
- Jumlah bibit  
tanaman buah yang  
dikembangkan
- Jumlah bibit  
tanaman buah yang  
dikembangkan  
(GUMMI)
- Jumlah bibit  
tanaman buah yang

- Jumlah bibit  
Tanaman Buah  
Kecamatan  
dan Seluruh  
Kecamatan yang  
dikembangkan  
dikembangkan  
dikembangkan  
dikembangkan

1. Sasaran Sub

Kegiatan ( Output )

Terdapatnya  
kemampuan  
kemampuan  
kemampuan

2. Indikator :

- Jumlah  
Kemampuan  
Kemampuan  
Kemampuan yang  
dikembangkan  
dikembangkan  
dikembangkan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapat Laporan Tahunan tentang Pengelolaan Perikanan dan Perikanan Masyarakat

2. Indikator:

- Jumlah Dokumen Tahunan Pengelolaan Perikanan dan Perikanan Masyarakat

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapat Laporan Keuangan Bulanan yang telah diproses dan dilaporkan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang di sistem informasi keuangan SKPD

2. Indikator:

- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Pemerintah Kabupaten Semarang SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang  
Laporan Keuangan Bulanan Pemerintah Kabupaten Semarang SKPD

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapat Dokumen Pelaporan dan Analisa Proses Realisasi Anggaran

2. Indikator:

- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Proses Realisasi Anggaran

1. Sasaran Kegiatan (Intermediate Outcome)  
Peningkatan Aset yang Berkelanjutan

2. Indikator:

- Persentase Aset yang Terdaftar sesuai dengan Katalisator Pengelolaan Sektoral NKP Daerah

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapat Laporan yang Terdaftar dan Penyertaan Laporan Beranggotakan Usahawan SKPD

2. Indikator:

- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyertaan Laporan Beranggotakan Usahawan SKPD

Jumlah Laporan

Rekonsiliasi

- Jumlah total jumlah luas yang dikembangkan  
Agrokomoditas
- Jumlah jenis usaha yang dibangun
- Jumlah petani tanaman pangan yang dikembangkan  
Agrokomoditas
- Jumlah total jumlah luas yang dikembangkan  
Agrokomoditas tahun 2022
- Jumlah total tanaman hias yang dikembangkan  
Agrokomoditas Semester II tahun 2022
- Jumlah petani lahan
- Jumlah SDG Hewan Ternak yang Diusulkan Peltakan dan Perumahan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):  
Terdapat aset dan sumber daya yang dikelola yang optimal

2. Indikator:

- Jumlah UPTD yang dibangun
- Jumlah aset yang dipelihara dan diperbaiki
- Jumlah aset barang milik
- Jumlah aset yang dikelola



1. Sasaran Sub Kegiatan (Duplik) Terutamaanya Sasaran Tertentu Perundang-undangan

2. Indikator

- a. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perundang-Perundangundangan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Duplik) Terutamaanya Sasaran Tertentu Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Indikator

- a. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangundangan

1. Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome) Tercapainya pelayanan administrasi kependudukan

2. Indikator

- a. Penerimaan Tercepatnya Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Duplik) Terutamaanya Sasaran Tertentu Pelaksanaan Anggaran Kemandirian

2. Indikator

- a. Jumlah Mekanisme Kemandirian Melalui Luas Peningkatan Anggaran Kemandirian yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Duplik) Terutamaanya Sasaran Tertentu Peningkatan Kinerja

2. Indikator

- a. Jumlah Pokok Bahasan dan Peningkatan Kinerja yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Duplik) Terutamaanya Sasaran Tertentu

2. Indikator

- a. Jumlah Mekanisme Peningkatan Kinerja yang Disediakan

a. Jumlah Mekanisme

yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Duplik)

2. Indikator

Terutamaanya Sasaran Tertentu Peningkatan Kinerja

2. Indikator

a. Jumlah Mekanisme

yang Disediakan



1. Mengurangi Anggaran Belanja dan Subsidi Pemerintah Berbagai Fasilitas dan DPM

2. Indikator

- a. Jumlah Dokumen Anggaran Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1. Basaran Kegiatan (mediate Outcome):  
Terdapatnya anggaran dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pemerintah daerah

2. Indikator

- a. Persentase Tercapainya Realisasi Anggaran dan Prasarana yang sesuai dengan ketentuan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapatnya

2. Indikator

- a. Jumlah Paket Medel yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapatnya Kearsifan Perangkat Lunak dan Kearsifan Data Jabatan

2. Indikator

- a. Jumlah Unit Kearsifan Perangkat Lunak dan Kearsifan Data Jabatan yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapatnya Kearsifan Lembar Kerja dan Lembar Kerja

2. Indikator

- a. Jumlah Unit Kearsifan Lembar Kerja dan Lembar Kerja yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)  
Terdapatnya Sarana dan Prasarana untuk Kearsifan Perangkat Lunak

2. Indikator

- a. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Lunak

- a. Jumlah unit paket Kearsifan Lembar Kerja dan Lembar Kerja Perangkat Lunak Berbasis Elektronik

- a. Jumlah program sosialisasi untuk mendukung Monev Perangkat Lunak Berbasis Elektronik

- a. Jumlah unit paket yang difasilitasi perantara

- a. Jumlah unit paket yang difasilitasi perantara

- a. Jumlah unit paket yang difasilitasi perantara

- a. Jumlah kegiatan monitoring Monev Perangkat Lunak Berbasis Elektronik

- a. Jumlah kegiatan yang difasilitasi perantara

- a. Jumlah kegiatan yang difasilitasi perantara

Rencana Kerja yang  
Ditentukan

1. Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):  
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Indikator

- Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terpenuhinya Penyelenggaraan  
Kerjasama, Sumber Daya dan Usaha

2. Indikator

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerjasama, Sumber Daya dan Usaha yang Disediakan

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terpenuhinya Jasa Usaha, dan Usaha Lain

2. Indikator

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan umum Kerjasama yang Disediakan

1. Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):  
Berlindungnya Barang Milik Daerah Dengan Baik

2. Indikator

- Persentase Barang Milik Daerah yang Terpeliharakan Dengan Baik

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terlaksananya 358 pemeliharaan dan pemantauan pagar dan benteng kabupaten dan operasionalnya oleh masyarakat

2. Indikator

- Jumlah Karcis/izin Ciri-ciri Operasional atau Laporan yang Dipevrihkan dan Dibatalkan Pagar dan Bentengnya

1. Sasaran Sub Kegiatan ( Output )  
Terlaksananya Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Indikator

- Jumlah Gedung Kantor dan  
Kampung Perkotaan yang  
diperbaiki dan ditingkatkan

1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):  
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia pertanian  
Sasaran yang Berkaitan dengan Kualitas  
Sumber Daya

## 2. Indikator

- Jumlah Peserta dan Pribadi  
Gedung Kantor dan Kampung  
Perkotaan yang Diperbaiki  
Ditingkatkan

### 1.6 Sasaran Program (Intermediate Outcome)

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pertanian

#### 2. Indikator:

- Peningkatan keterampilan petani & SDM pertanian

### 1. Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)

Meningkatnya Kapasitas kelompok masyarakat pertanian

#### 2. Indikator:

- Jumlah petani dan masyarakat yang meningkatkan keterampilan

### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani dan masyarakat desa

#### 2. Indikator

- Jumlah Fasilitas Pelatihan Pertanian Seadanya yang terdapat di dalam pelaksanaan tugas
- Jumlah Dokumen Program Pelatihan (Tingkat Kabupaten dan Desa)
- Jumlah Fasilitas awal pertanian yang dibangun
- Jumlah penyuluh pertanian yang bekerja dan aktif melaksanakan tugas
- Jumlah petani penerima pelatihan pertanian dari kelembagaan penyuluhan tingkat desa
- Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang terlatih dan aktif melaksanakan
- Jumlah peserta pelatihan petani penyelenggara penyuluhan tingkat desa/kelurahan
- Jumlah peserta pelatihan penyuluh pertanian
- Jumlah peserta sandan berdaya
- Jumlah Pengisian Data Mendukung Inpres No 3 Tahun 2023
- Jumlah peserta ASW, TNU-TBPPD dan PPS ulahan yang mendapat penghargaan
- Jumlah penyuluh swadaya yang mengorganisir kelompok tani
- Jumlah PPS terdapat dan posdes berprestasi
- Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang diidentifikasi sebagai insentif

### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)

Meningkatnya keterampilan, sikap dan kemampuan kelompok tani dan masyarakat tani pada Kawasan Berdaya

#### 2. Indikator

- Jumlah kelompok tani yang mendapat dukungan teknis dan pelatihan berprestasi
- Jumlah kegiatan KTRN yang dilaksanakan

- a. Jumlah investasi komersial BPP (tidak termasuk yang direalisasi)
- b. Jumlah dokumen BPP yang terklasifikasi
- c. Jumlah kegiatan usaha investasi komersial yang direalisasi
- d. Jumlah kegiatan usaha investasi komersial yang direalisasi
- e. Jumlah peserta pameran dagangan yang terdorong/jual
- f. Jumlah HAP Tingkat Provinsi yang terdorong/jual
- g. Jumlah fasilitas mikro usaha
- h. Jumlah kegiatan dan usaha yang K/NA
- i. Jumlah kegiatan dan usaha dalam rangka bank bank Mandiri yang Mendukung Standar Penyediaan Bank Perkotaan Unggul (BPKU) Berselaras
- j. Jumlah bibit untuk persediaan dan baru yang terdorong/jual
- k. Jumlah Ketersediaan Reklamasi, Kacamoran dan Casing yang Ditinjau dari Kapasitasnya

#### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Terdapatnya Pemukiman Sawah dan Pesisir yang Terdorong

##### 2. Indikator:

- a. Jumlah lahan percontohan BPP (Garis Merah) yang terbangun dan terpelihara
- b. Jumlah Daniric BPP yang terklasifikasi
- c. Jumlah orang yang terdorong/jual
- d. Jumlah Paket Pemertajahan dan Pemertajahan Lahan Percontohan Candi
- e. Jumlah bangunan pada lahan AFS yang terpelihara
- f. Jumlah Penyalah Dinas Penyuluh Kaurah yang terdorong/jual
- g. Jumlah Pemertajahan Mandat/ Penyuluh
- h. Jumlah pelaksanaan F-11 yang terdorong/jual
- i. Jumlah Simulasi dan Prakerja Pemertajahan Pertanian

#### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Terdapatnya Pemukiman Sawah dan Pesisir

##### 2. Indikator:

- a. Jumlah pelaksanaan pemertajahan
- b. Jumlah Sejalan Lapangan Mendukung Standar Penyediaan Bank Perkotaan Unggul Bemeritikal
- c. Jumlah Sejalan Lapangan Mandat/ Penyuluh Terdorong dan Beroperasi

#### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Meningkatnya Kecepatan Penyuluh Pertanian

##### 2. Indikator:

- a. Jumlah penyuluh pertanian yang efektif dan BPP (DAK Non Fisik)
- b. Jumlah peserta pameran agribisnis quality
- c. Jumlah peserta BPP/IK Kaurah Murni dan pembagian petani
- d. Jumlah penyuluh pertanian yang terdorong dan ditinjau dari kapasitasnya

#### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Terdapatnya Kecepatan Ketersediaan pemertajahan Pertanian

##### 2. Indikator:

- a. Jumlah Ketersediaan dan jumlah pemertajahan di tingkat kabupaten/kota yang ditinjau dari kapasitasnya

#### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output):

Terdapatnya Kecepatan Ketersediaan Pertanian

## 2. Indikator

- a. Jumlah kegiatan di dalam pemerintahan dan pemerintahan lokal
- b. Jumlah kegiatan belia yang ada di kawasan RBT
- c. Jumlah klub atau klub muda pemerintah yang ada di kawasan
- d. Jumlah klub atau klub Eksekutif Pemuda yang ada di kawasan

## 3. Sasaran Sub Kegiatan (Output)

1. Meningkatkan jumlah klub atau klub pemuda di kawasan

## 2. Indikator

- a. Jumlah kegiatan pemuda di kawasan pemerintahan
- b. Jumlah klub atau klub pemuda di kawasan
- c. Jumlah klub atau klub pemuda di kawasan
- d. Jumlah kegiatan pemuda di kawasan pemerintahan

#### 2. Indikator

- a. Jumlah kegiatan pelatihan perantara dan pembimbing KEP
- b. Jumlah kegiatan pelaksanaan pembina KEP
- c. Jumlah kegiatan jalan usaha usaha kecil (JUU) di desa MS
- d. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Desa yang dibentuk

#### 1. Sasaran Sub Kegiatan (Output)

Terdapatnya unit/kelembagaan Usaha Kecil, Usaha Mikro, dan Usaha Perantara

#### 2. Indikator

- a. Jumlah kegiatan usaha perantara, pembina dan pembimbing
- b. Jumlah omset dan lapangan kerja
- c. Jumlah pebibitan Usaha perantara
- d. Jumlah masyarakat, informasi teknis, sosial, ekonomi dan budaya perantara



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Leljen. Ibrahim Adjie Kel. Sindang Barang Kec. Bogor Barat Kota Bogor 16117  
Telp/ Fax : (0251) 8323976 Website : <http://distanhortun.bogorkab.go.id>, e-mail : [distanhortun@bogorkab.go](mailto:distanhortun@bogorkab.go)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 500.6.1/1014.SK-Sekret

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN  
PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR NOMOR  
500.6.1/903.SK-Sekret TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Nomor 500.6.1/903.SK-Sekret tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
  - bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Nomor 500.6.1/903.SK-Sekret tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 46);
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/38/Kpts/Per-UU/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja;
- KEEMPAT** : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor;

**KEENAM.....**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura, dan Perkebunan  
Kabupaten Bogor



ENTIS SUTISNA

The image shows the official seal of Kabupaten Bogor, which is circular and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR" around the perimeter. In the center of the seal is a shield with a blue and white design. To the right of the seal is a blue ink signature, and below the signature is the name "ENTIS SUTISNA".

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NOMOR : 500.6.1/1014/SK-Sekret

TANGGAL : 13 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan tugas pembantuan
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;  
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;  
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian;  
d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;  
e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU			FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2024	2025	2026			
1	Meningkatnya produk pertanian		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	748.135 Ton	802.441 Ton	892.441 Ton	= Produksi tanaman pangan + produksi hortikultura + produksi perkebunan	Kepala Dinas	Data Statistik Pertanian Distanhortun
2		Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	6,74 Ton/Ha	6,75 Ton/Ha	6,76 Ton/Ha	= Produksi pertanian (ton)/Luas panen (ha)	Kepala Dinas	Data Statistik Pertanian Distanhortun





NO	INDIKATOR	REVISI	TARGET																

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Hortikultura,  
dan Peternakan Bogor

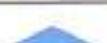


## PETA PROSES BISNIS (PROBIS) Identifikasi Lintas Fungsi

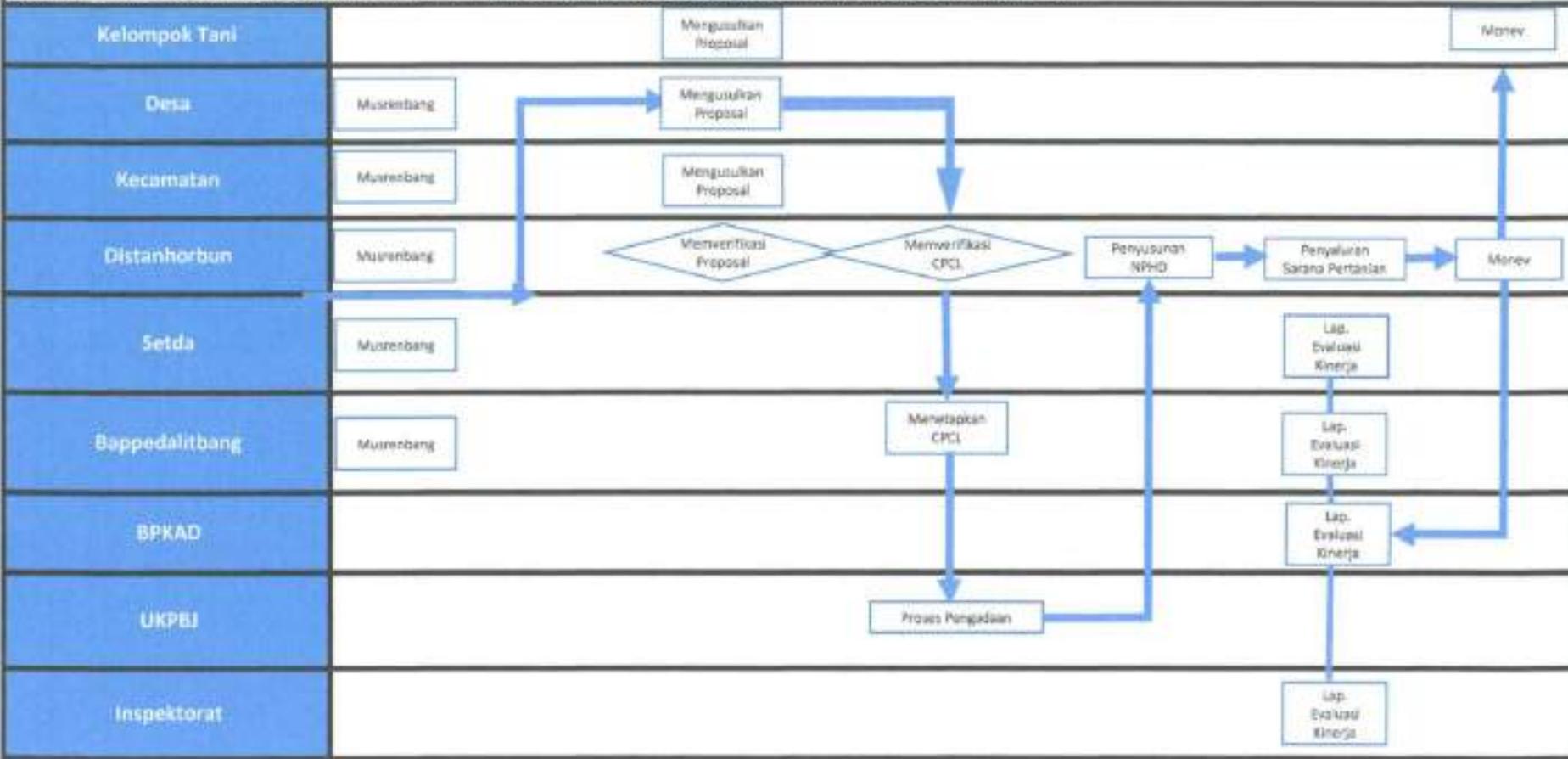
Peta Proses : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (PROGRAM)

Sub Proses : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (KEGIATAN)

Lintas Fungsi : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (SUB KEGIATAN)

No	Tahapan Kegiatan	Unit Kerja Terkait												Simbol
		(3)												
(1)	(2)	Distanhorbun	Kelompok Tani	Desa	Kec	Setda	Bappedalitbang	BPKAD	UKPB	Inspektorat	Diskominfo	Dinas Provinsi	Kementerian	(4)
1	Musrenbang	√		√	√	√	√							
2	Usulan proposal		√	√	√									
3	Verifikasi proposal	√												
4	Verifikasi CPCL	√												
5	Penetapan CPCL	√				√								
6	Proses pengadaan	√							√					
7	Penyusunan NPHD	√												
8	Penyaluran bantuan	√	√											
9	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√											
10	Menyampaikan dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	√				√	√	√		√				

KABO 7.1. CFM.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi



# PETA PROSES BISNIS (PROBIS) Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (PROGRAM)

Sub Proses : Pembangunan Prasarana Pertanian (KEGIATAN)

Lintas Fungsi : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (SUB KEGIATAN)

No (1)	Tahapan Kegiatan (2)	Unit Kerja Terkait (3)												Simbol (4)
		Distanhorbun	Kelompok Tani	Desa	Kec	Setda	Bappedalitbang	BPKAD	UKPBJ	Inspektorat	Diskominfo	Dinas Provinsi	Kementerian	
1	Musrenbang	√		√	√	√	√							
2	Usulan proposal		√	√	√									
3	Verifikasi proposal	√												
4	Verifikasi CPCL	√												
5	Penetapan CPCL	√				√								
6	Proses Pengadaan	√							√					
7	Penyusunan NPHD	√												
8	Penyaluran bantuan	√	√											
9	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√											
10	Menyampaikan dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	√				√	√	√		√				

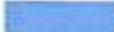


## PETA PROSES BISNIS (PROBIS) Identifikasi Lintas Fungsi

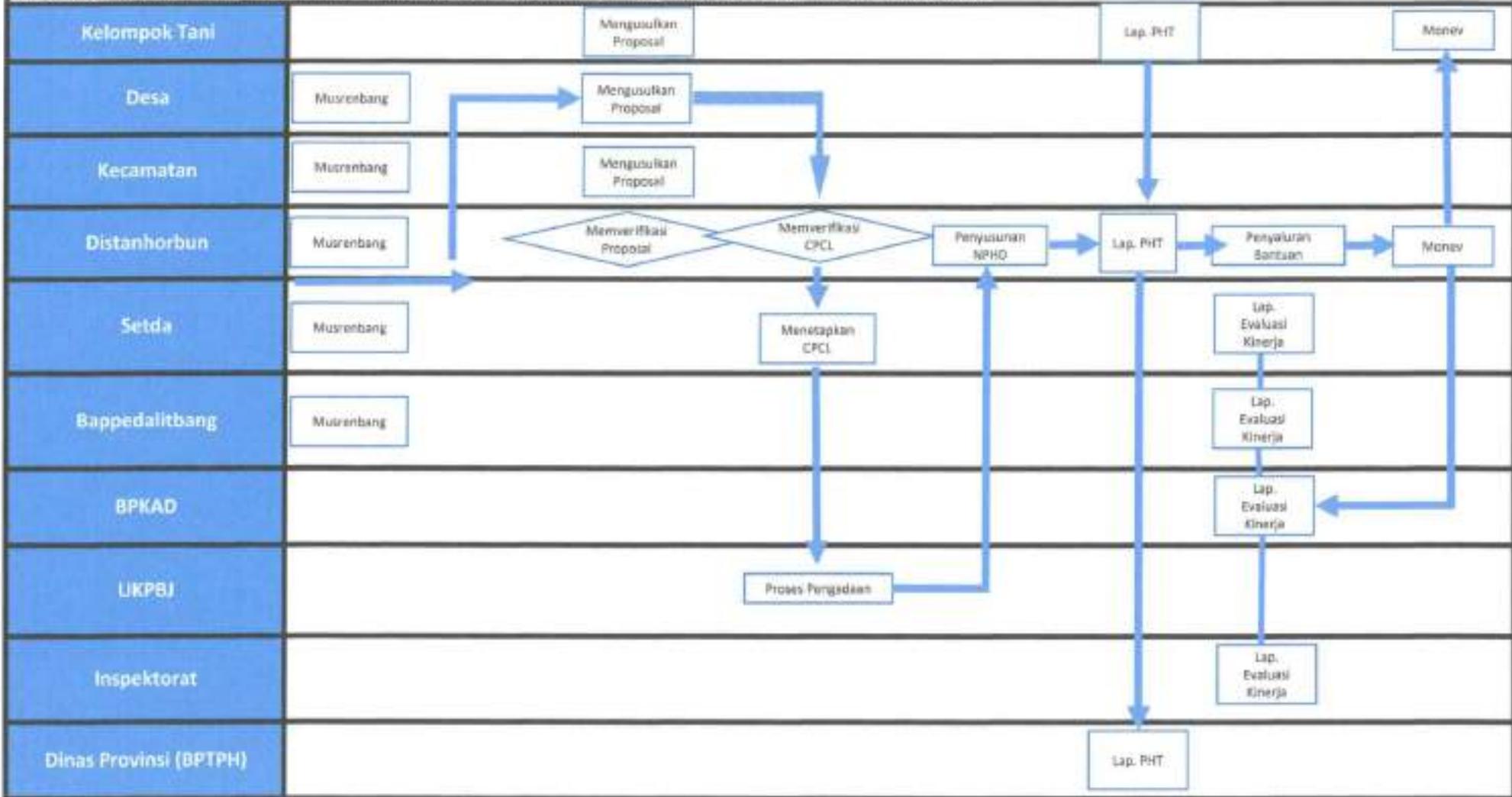
Peta Proses : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (PROGRAM)

Sub Proses : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (KEGIATAN)

Lintas Fungsi : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (SUB KEGIATAN)

No	Tahapan Kegiatan	Unit Kerja Terkait												Simbol
		(3)												
(1)	(2)	Distanhorbun	Kelompok Tani	Desa	Kec	Setda	Bappedalitbang	BPKAD	UKPBJ	Inspektorat	Diskominfo	Dinas Provinsi (BPTPH)	Kementerian	(4)
1	Musrenbang	√		√	√	√	√							
2	Usulan proposal		√	√	√									
3	Verifikasi proposal	√												
4	Verifikasi CPCL	√												
5	Penetapan CPCL	√				√								
6	Proses Pengadaan	√							√					
7	Penyusunan NPHD	√												
8	Laporan PHT	√	√									√		
9	Penyaluran bantuan	√	√											
10	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	√	√											
11	Menyampaikan dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD	√				√	√	√		√				

KABO 7.1. CFM.3 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan















SISWA/SUB BAGIAN	INDIKATOR SUB BAGIAN	SUB BAGIAN	TARGET ERANGKIP TAM	LRA	KETERANGAN	ANGGARAN TAM	Tipe/01 (Bulan ke-1)											
							Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Terwujudnya Penyelenggaraan, Kemitraan, Sumber Daya Air dan Lahan yang Berkelanjutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan, Kemitraan, Sumber Daya Air dan Lahan yang Disampaikan	Penyediaan Jasa Kemitraan, Sumber Daya Air dan Lahan	12 laporan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan, Pelaksanaan Umum Kantor yang Disampaikan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pembayaran pajak dan perantara kemudian bisa operasional atau lapangan	Jumlah Kebutuhan Tanah Operasional atau Lapangan yang Ditinjau dan Dibayarkan Pajak dan Perantara	Penyediaan Jasa Pemukiman, Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perantara Kebutuhan Tanah Operasional atau Lapangan	270 unit								25					100		
Terwujudnya Pemeliharaan/Ketebalasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Restorasi	Pemeliharaan/Restorasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11 unit						4		3		4					
Terwujudnya Pemeliharaan/Ketebalasan Sertan dan Praktek Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sertan dan Praktek Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Restorasi	Pemeliharaan/Restorasi Sertan dan Praktek Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	294 unit					1			1	1				211		

Kepala Dinas Perikanan, Hortikultura, dan Perkebunan  
Kabupaten Bogor



NITIS SUZANA, S.Pd, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 194710041992121001



**RENCANA AKSI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

NO	INDIKATOR EVALUASI SAKIP	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kinerja	Meningkatkan implementasi SAKIP agar dapat meningkatkan nilai pada tahun yang akan datang Memperkuat sistem perencanaan dengan melibatkan UPT dan BPP Menyelaraskan dokumen Renstra dengan dokumen RPD Mempertajam target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan basis data sebagai upaya mencapai tujuan maupun sasaran perangkat daerah
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan pengukuran kinerja secara rutin melalui rapat evaluasi lingkup dinas dan membandingkan dengan target yang akan dicapai Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) guna dicantumkan pada Perjanjian Kinerja
3	Pelaporan Kinerja	Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan kegiatan per bulan dan per triwulan
4	Evaluasi Kinerja	Melakukan evaluasi kinerja dan monitoring pelaksanaan kegiatan per bulan dan per triwulan
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Menganalisis permasalahan pencapaian target kinerja dan mencari solusi atau inovasi guna mengatasi permasalahan tersebut
6	Penyelenggaraan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Adanya SK Tim Penerapan SPM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Melibatkan unsur indikator SPM dalam penyusunan indikator kinerja pada Renstra Dinas 2024-2026 Melakukan evaluasi capaian bersama Tim Penerapan SPM di tingkat Kabupaten Bogor dan lingkup Dinas melalui rapat koordinasi maupun rapat kerja Mengalokasikan anggaran program dan kegiatan terutama untuk pencapaian penerapan SPM secara optimal

**Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan  
Kabupaten Bogor**















Year	Quarter	Month	Project Name	Project Manager	Project Budget (USD)				Actual Spend (USD)				Budget Variance (USD)				Project Status	Risk Level	
					Total Budget		Total Spend		Total Budget		Total Spend		Total Budget		Total Spend				
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
2023	Q1	Jan	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q1	Feb	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q1	Mar	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q2	Apr	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q2	May	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q2	Jun	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q3	Jul	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q3	Aug	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q3	Sep	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q4	Oct	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q4	Nov	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2023	Q4	Dec	Project Alpha	John Doe	100000	120000	100000	120000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	0	0
2024	Q1	Jan	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q1	Feb	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q1	Mar	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q2	Apr	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q2	May	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q2	Jun	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q3	Jul	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q3	Aug	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q3	Sep	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q4	Oct	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q4	Nov	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2024	Q4	Dec	Project Beta	Jane Smith	150000	180000	150000	180000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
2025	Q1	Jan	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q1	Feb	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q1	Mar	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q2	Apr	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q2	May	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q2	Jun	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q3	Jul	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q3	Aug	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q3	Sep	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q4	Oct	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q4	Nov	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0
2025	Q4	Dec	Project Gamma	Mike Johnson	200000	240000	200000	240000	0	40000	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	0





No	Kategori Tanaman (Kode Tanaman)	Nama Tanaman (Nama Lokal)	Luas Tanaman (M <sup>2</sup> )				Produksi (kg)				Keterangan	No
			1	2	3	4	5	6	7	8		
<p>1. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>2. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>3. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>4. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>5. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>6. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>7. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>8. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>9. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p> <p>10. Tanaman ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rumah.</p>												



Bogor, Januari 2020  
 Direktur  
 Kepala Badan Pangan Hortikultura dan Perikanan  
 Bogor  
 [Signature]  
 NIP. 197001198210001

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER (TRIWULAN IV) TAHUN 2025

FORM 3

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Permasalahan Kodefikasi Masalah
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Realisasi Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/3*100	10	11	12
1	Insentif Penyuluh Pertanian PNS Wilayah Barat	86	Orang	401.280.000	86	Orang	401.280.000	100	√		Dinamika Jumlah Penyuluh ASN (Pensiun dan Alih Jabatan). Untuk poin 3-5 tidak ada penyaluran sebesar Rp. 57.732.000,- karena THL BPP sudah diangkat menjadi PPPK per Desember TA. 2024
2	Insentif Penyuluh Pertanian PPPK Wilayah Barat	55	Orang	255.360.000	55	Orang	255.360.000	100	√		
3	Insentif THL BPP	-	Orang	9.120.000	-	Orang	-	-	√		
4	Honorarium THL TBPP	-	Orang	48.000.000	-	Orang	-	-	√		
5	BPJS THL TBPP	-	Orang	612.000	-	Orang	-	-	√		
JUMLAH		141		714.372.000	141		656.640.000	92			

Bogor, Januari 2026

Disusun

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN BOGOR



Entis Sutisna, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196710041992121001

**TABEL PERBANDINGAN**  
**JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN 2025**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1	Jumlah Program	6	6
2	Jumlah Kegiatan	15	15
3	Jumlah Sub Kegiatan	52	71
4	<b>Jumlah Anggaran :</b>	<b>68.846.590.401</b>	<b>101.557.142.152</b>
	<b>A. Belanja Operasi</b>	<b>62.864.297.023</b>	<b>91.927.677.421</b>
	Belanja Pegawai	35.102.740.709	34.120.944.232
	Belanja Barang dan Jasa	27.761.556.314	57.806.733.189
	Belanja Hibah	-	-
	<b>B. Belanja Modal</b>	<b>5.982.293.378</b>	<b>9.629.464.731</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.774.110.134	5.881.511.101
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.332.669	3.747.953.630
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	207.850.575	-

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR**  
**INOVASI TAHUN 2025**

NO	NAMA INOVASI	RANCANG BANGUN INOVASI (300 Kata)	KETERANGAN
1	<b>RUMASA</b> <b>“RUMPIN</b> <b>PUNYA RASA</b> <b>(HILIRISASI</b> <b>KOPI</b> <b>RUMPIN)”</b>	Permasalahan sekaligus tantangan utama yang dihadapi para petani kopi yaitu pemasaran produk pertanian terutama pada saat terjadi panen raya kopi. Rendahnya harga kopi ditingkat petani, sementara petani terdesak kebutuhan sehingga merelakan hasil pertaniannya dijual dengan harga murah. Mengingat sektor pertanian di Kabupaten Bogor memiliki berbagai potensi dan kondisi yang berbeda satu sama lainnya yang secara administratif terdiri dari 40 kecamatan, 417 desa, dan 17 kelurahan. Maka berdasarkan hal tersebut, diperlukan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani kopi sekaligus menjaga identitas kopi rumpin. Kopi Rumpin sendiri terkenal dengan rasanya yang khas, ini dibuktikan dengan hasil cupping kopi dan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh PT. Riset Perkebunan Nasional.	Tahun 2025

**DATA PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR TAHUN 2025**

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKATAN			PERINGKAT/JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN/PRESTASI	LOKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN/PRESTASI	WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN/PRESTASI	FOTO
		INTER-NASIONAL	NASIONAL	PROVINSI					
1	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada BPP (Wilyah V Kab. Bogor sebagai Juara I Kategori Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.			√	Juara I	Gubernur Jawa Barat	Kebun Istimewa Kab. Purwakarta	13 November 2025	
2	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Gapoktan Benteng Mekmur Kab. Bogor sebagai Juara I Kategori Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.			√	Juara I	Gubernur Jawa Barat	Kebun Istimewa Kab. Purwakarta	22 Agustus 2024	
3	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Abor (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Apresiasi Regenerasi Petani Inovatif dan Berdaya Saing Tamanan Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Barat.			√	Juara II	Gubernur Jawa Barat	Kebun Istimewa Kab. Purwakarta	22 Agustus 2024	
4	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Supardi (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Apresiasi Regenerasi Petani Inovatif dan Berdaya Saing Tanaman Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat.			√	Juara II	Gubernur Jawa Barat	Kebun Istimewa Kab. Purwakarta	22 Agustus 2024	
5	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Saudara Mad Eloh (Petani Kab. Bogor) sebagai Juara II Kategori Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.			√	Juara Harapan I	Gubernur Jawa Barat	Kebun Istimewa Kab. Purwakarta	22 Agustus 2024	
6	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor sebagai Juara Umum Penghargaan insan Pertanian Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.			√	Juara Umum	Gubernur Jawa Barat	Kebun Istimewa Kab. Purwakarta	30 Agustus 2024	

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKATAN			PERINGKAT/JENIS PENGHARGAAN/PRESTASI	INSTITUSI PEMBERI PENGHARGAAN/PRESTASI	LOKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN/PRESTASI	WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN/PRESTASI	FOTO
		INTER-NASIONAL	NASIONAL	PROVINSI					
7	Penghargaan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor sebagai Juara I Lomba Stand Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Barat			V	Juara I	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	SPORT Jaber Arcamewik Kita Bandung	07 Desember 2025	

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ANP DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYAN RAB. BOGOR TAHUN 2024

No	Hasil Evaluasi Per Komponen ANP Tahun 2024	Rekomendasi IAE 2024	Ditindak Lanjut	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Pemanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja (11,30)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pengukuran Kinerja (23,70)	Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh unit kerja dan melaksanakan seluruh rekomendasi atau strategi yang ditetapkan pada saat pengukuran kinerja serta mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan hasil pembahasan forum laporan tahunan (jurnal) yang ditandatangani pejabat atasan unit kerja atau bidang dengan mengetahui Pimpinan OPD	Tidak melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh unit kerja dan melaksanakan seluruh rekomendasi atau strategi yang ditetapkan pada saat pengukuran kinerja serta mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan hasil pembahasan forum laporan tahunan (jurnal) yang ditandatangani pejabat atasan unit kerja atau bidang dengan mengetahui Pimpinan OPD	Tersusunnya notulen rapat pembahasan forum laporan tahunan (jurnal) yang ditandatangani setiap pimpinan unit kerja atau bidang dengan mengetahui Pimpinan OPD	Setiap triwulan tahun berjalan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor	Sudah Ditindaklanjuti	<a href="https://drive.google.com/outr/e/folders/1Wg2CB_9DQgr5AR6ADPc79YH44_LuKQ">https://drive.google.com/outr/e/folders/1Wg2CB_9DQgr5AR6ADPc79YH44_LuKQ</a>
3	Penetapan Kinerja (10,30)	Informasi dalam laporan kinerja agar dibubung dengan hasil pembahasan laporan kinerja yang dibuktikan dengan notulen/nota laporan pembahasan target dan realisasi kinerja/berita acara, daftar hadir/dokumentasi rapat/notasi tentang keterlibatan penyusun yang ditandatangani pimpinan OPD	Tidak menyusun informasi dalam laporan kinerja yang dibuktikan dengan hasil pembahasan laporan kinerja dan dibuktikan dengan notulen/nota laporan pembahasan target dan realisasi kinerja/berita acara, daftar hadir/dokumentasi rapat/notasi tentang keterlibatan penyusun yang ditandatangani pimpinan OPD	Tersusunnya Berita Acara dan daftar hadir/dokumentasi rapat tentang keterlibatan pimpinan dalam penyusunan laporan kinerja yang ditandatangani Pimpinan OPD	Setiap triwulan tahun berjalan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor	Sudah Ditindaklanjuti	<a href="https://drive.google.com/outr/e/folders/1Wg2CB_9DQgr5AR6ADPc79YH44_LuKQ">https://drive.google.com/outr/e/folders/1Wg2CB_9DQgr5AR6ADPc79YH44_LuKQ</a>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (10,35)	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dibuktikan dengan Peraturan / SK / SOP / Peraturan Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tidak melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dibuktikan dengan Peraturan / SK / SOP / Peraturan Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersusunnya SK / SOP / Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersepat 02 Juni 2025	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor	Sudah Ditindaklanjuti	<a href="https://drive.google.com/outr/e/folders/1Wg2CB_9DQgr5AR6ADPc79YH44_LuKQ">https://drive.google.com/outr/e/folders/1Wg2CB_9DQgr5AR6ADPc79YH44_LuKQ</a>

Bogor, 12 Juni 2025  
 Kepala Dinas  
  
**AGUS SETIAWAN, S.Pd, MPA**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196211041983121001



# **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TA. 2025**

**Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN BOGOR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama: RUDY SUSMANTO  
Jabatan: BUPATI BOGOR

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA  
RUDY SUSMANTO



Bogor, 3 November 2025  
PIHAK PERTAMA  
ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
NIP. 196210041992121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	710189
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	7,13

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.458.953,671	APBD
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	36.458.941,985	APBD
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.004.722,148	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.607.260,291	APBD
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.569.738,067	APBD
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.457.525,100	APBD

  
 BUPATI BOGOR  
  
 RUDY SUSANTO

Bogor, 3 November 2025  
 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
  
  
 DENNY SURTISNA, S.Pd, MM  
 NIP. 196710041992121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama EDY MULYADI, ST, MT  
Jabatan SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
Jabatan KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

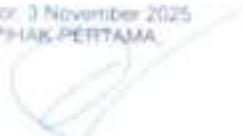
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak KEDUA  
  
ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
NIP. 196710041992121001

Bogor, 3 November 2025  
PIHAK PERTAMA

  
EDY MULYADI, ST, MT  
NIP. 196811121997031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Predikat	BB
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	88,21
4	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90
5	Terpenuhiya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100
6	Terpenuhiya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhiya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100
7	Terpenuhiya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100
8	Terpenuhiya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
9	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296,331,870	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34,369,498,514	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,620,250	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231,701,850	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,563,552,073	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,379,097,238	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,312,732,776	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,282,419,000	APBD



Bagor, 3 November 2025  
SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN,

EDY MULYADI, ST, MT  
NIP. 196811121997031005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama RUHENDRA, SP, MM  
Jabatan KEPALA BIDANG SARANA PERTANIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
Jabatan KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

sesuai arahan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
  
ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
NIP. 196710041990121001

Bogor, 3 November 2025  
PIHAK PERTAMA



RUHENDRA, SP, MM  
NIP. 196805201991031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
 KEPALA BIDANG SARANA PERTANIAN  
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terpanuhinya kebutuhan sarana pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	17,24
2	Tercapainya luasan areal tanam	Jumlah luas areal tanam	Ha	85774
3	Tersedianya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Cluster Komoditas	3

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13,041,754,044	APBD
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	23,417,187,941	APBD



Bogor, 3 November 2025  
 KEPALA BIDANG SARANA PERTANIAN,

RUHENDRA, SP, MM  
 NIP. 196605201991031006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRİYATI, S.HuT  
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA PERTANIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Bogor, 3 November 2025  
PIHAK PERTAMA

INDRIYATI, S.HuT  
NIP. 197206291982031002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PRASARANA PERTANIAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	16.55
2	Tersedianya informasi pengembangan prasarana pertanian yang akurat	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	Dokumen	3
3	Tercapainya luas lahan yang terlayani prasarana pertaniannya	Total Luas Lahan yang Terlayani Prasarana Pertanian	Ha	305.04

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	773,193,993	APBD
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	6,231,528,155	APBD



Bogor, 3 November 2025  
KEPALA BIDANG PRASARANA PERTANIAN,

INDRIYATI, S.Hut  
NIP. 197206291998032002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: JUDI RACHMAT SULAEI, S.Hu, MM  
Jabatan: KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN USAHA PERTANIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama: ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
Jabatan: KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
  
ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
NIP. 196710041962121001

Bogor, 3 November 2025  
PIHAK PERTAMA  
  
JUDI RACHMAT SULAEI, S.Hu, MM  
NIP. 197007111993021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN USAHA PERTANIAN  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	2,80
2	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	13,49
3	Terkelolanya cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Ha	1590
4	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mendapatkan arahan teknis	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	Pelaku Usaha	295

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.607.260.291	APBD
2	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.569.738.967	APBD



Bogor, 3 November 2025  
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
USAHA PERTANIAN

JUDI RACHMAT SULAEI, S.Hi, MM  
NIP. 197007111893021001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUDI RACHMAT SULAEI, S.Hut, MM  
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

seleksi atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
  
ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM  
NIP. 196710041992121001

Bogor, 3 November 2025  
PIHAK PERTAMA  
  
JUDI RACHMAT SULAEI, S.Hut, MM  
NIP. 197607111993021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
PLT. KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOGOR.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	%	1,08
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah petani dan penyuluh yang meningkat kompetensinya	Orang	1307

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.457.525.190	APBD



Bogor, 3 November 2025  
PLT. KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN,

JUDI RACHMAT SULAEI S.Pd, MM  
NIP. 197007111993021001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen Ibrahim Adjie Kel. Sindangharang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp./Fax. (0251) 8323976 Website : [www.distanhut.bogorkab.go.id](http://www.distanhut.bogorkab.go.id)

Email : [distanhut@bogorkab.go.id](mailto:distanhut@bogorkab.go.id)

---

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : Daftar Terlampir  
Dari : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor  
Nomor : 000.1.5/1841.Sekret  
Tanggal : 19 September 2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Undangan Rapat Dinas

---

Sehubungan pelaksanaan anggaran kegiatan sudah memasuki akhir triwulan III, maka akan dilaksanakan Rapat Dinas pada :

Hari / Tanggal : Senin / 22 September 2025  
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai  
(sebelumnya mengikuti Apel Pagi)  
Tempat : Aula Rapat Dinas (Aula Utama)  
Acara : 1. Evaluasi Realisasi Anggaran/Fisik Kegiatan T.A 2025  
(menyiapkan data pengadaan barang/jasa yang belum dilaksanakan/belum dicairkan)  
2. Evaluasi Kinerja Triwulan III dan Finalisasi Perubahan Anggaran Reguler T.A 2025

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.



**KEPALA DINAS,**

**ENTIS SUTISNA, SPd, MM**  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 196710041992121001

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 000.1.5/1841.Sekret

Tanggal : 19 September 2025

Perihal : Undangan Rapat Dinas

---

Daftar Undangan :

1. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
2. Seluruh Kepala Bidang ;
3. Kasubag. Keuangan, Kasubag. Umpeg dan seluruh Ketua Tim ;
4. Seluruh Kepala UPT dan Kasubag. TU UPT ;
5. Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pengurus Barang



**KEPALA DINAS,**

**ENTIS SUTISNA, SPd, MM**  
Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 196710041992121001



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jl. Letjen H. Djuanda, Adre Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp./ Fax: (0251) 8523976 Website: [www.distanfu.bogorkab.go.id](http://www.distanfu.bogorkab.go.id)

Email: [info@bogorkab.go.id](mailto:info@bogorkab.go.id)

---

## LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT

Kepada Yth : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Bogor

Tanggal : 5 Juni 2025

Bertitik : Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan  
T.A 2025

---

### A. Dasar Pelaksanaan

Nota Dinas Undangan Kepala Dinas Nomor 000.1.5/12/1 Sekelompok Undangan Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan T.A 2025

### B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tg : Kamis, 5 Juni 2025

Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai

Tempat : Aula Rapat Dinas (Astana)

### C. Peserta Rapat

1. Plt. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Sekelompok Kepala Bidang Langkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Kasubag Keuangan, Kasubag Unpeg dan seluruh Ketua Tim
4. Sekelompok Kepala UPT dan kasubag TU UPT
5. Bendahara Pengeluaran (dP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan pengawas Harang

### D. Hasil

Rapat dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



b. Secara umum kendala dan masalah yang dihadapi dalam penyerapan anggaran antara lain :

- Adanya aplikasi baru dalam pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan pengadaan barang dan jasa, diantaranya : aplikasi coretax (terkait perpajakan), e-catalog versi 6 (dalam pengadaan barang dan jasa), sehingga dibutuhkan waktu untuk mempelajari dan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
- Proses pembayaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui E-Catalog versi 6 baru dapat dilakukan di pertengahan bulan April 2025 (*trial by error*).
- Realisasi anggaran belum sesuai dengan jadwal anggaran kas (dapat dilihat pada tabel realisasi).
- Adanya maintenance aplikasi dan error/lemot pada aplikasi.
- Saat adanya pergeseran anggaran, terdapat jeda waktu untuk tidak/belum dapat mengajukan SPP/SPM terlebih dulu.
- Adanya kegiatan/program prioritas yang harus didahulukan, sehingga harus menunda kegiatan yang sudah terjadwal (terjadi di bulan Februari-Maret).

c. Penanganan kendala dan masalah dalam penyerapan anggaran:

- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait (dengan BPKAD, KPP Cibinong).
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pejabat Pengada (PP) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa-Setra dan operator PPK.
- Memperhatikan anggaran kas, dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggarannya.
- Mempertimbangkan pelaksanaan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa.



Platform. Bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan, penyetoran, ataupun pelaporan pajak. Invoice yang dikeluarkan oleh platform sudah dipersamakan dengan Faktur Pajak.

- Metode Pembayaran Langsung (LS) : Peraturan pajak yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Satker. Penyedia perlu melakukan upload Faktur Pajak dan Bukti Potong atas PPh.
- Penyedia akan dikenakan potongan biaya transaksi mencakup biaya payment gateway dan biaya bank, berdasarkan nominal yang telah disepakati antara tim Katalog dan Mitra Payment Gateway.

- f. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi capaian kinerja sampai dengan TW II 2025, diawali dengan penjelasan umum dan dilanjutkan dengan desk pengisian tabel capaian kinerja dan penandatanganan berita acaranya oleh Tim Program dan Laporan (Proglap).

Demikian disampaikan laporan hasil rapat evaluasi ini, sebagai bahan lebih lanjut.

Kasubag. Keuangan,



**Indri Wulandari, SP**

NIP. 197412271999032007

Mengetahui,

Plt. Sekretaris Dinas



**Ruhendra, SP, MM**

NIP. 196805201991031006

1. Kepala Bidang Prasarana Pertanian

2. Kepala Bidang PPUP

3. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian

4. Kepala Bidang Sarana Pertanian



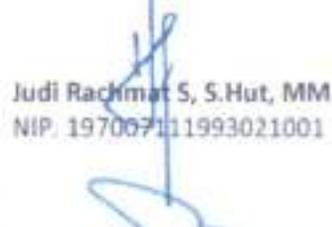
**Ruhendra, SP, MM**

NIP. 196805201991031006



**Indriyati, S.Hut**

NIP. 197204291998032002



**Judi Rachmat S, S.Hut, MM**

NIP. 197007111993021001



**R. Suhartono, SP**

NIP. 197004272002121002

**DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DISTANHORBUN**



